

DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia)

Fitri Rahmawati, Endang Kiswara¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine the Impact of the Covid-19 Pandemic on Regional Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia. In addition, this study aims to determine whether there are differences in the regional financial performance of provincial governments in Indonesia during Covid-19 compared to before Covid-19. This study is a replication of the research conducted by Vladimir, et al (2020) in Russia. This study looks at the financial aspects of the APBD realization report, but the proxy measurement variables used are different. The sample population in this study were 34 provinces. This study uses secondary data sourced from the APBD Realization Report (Regional Revenue and Expenditure Budget) from 2019 to 2020. The test tool used is parametric using Paired T-Test. Based on the results of the study, this study states that the ratio of financial performance to the effectiveness of PAD, the ratio of regional tax contributions to PAD, and the ratio of capital expenditures have significant differences before and during the Covid-19 pandemic. The ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of financial independence, and the ratio of regional retribution contributions did not experience significant differences before and during Covid-19.

Keywords: Covid-19 pandemic, APBD, financial performance ratio, paired T-Test

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan kepentingan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam sektor publik yang lebih baik dan demokratis. Otonomi daerah akan bekerja dengan baik apabila pemerintah mampu dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang potensial sebagai alat penggerak pembangunan daerah, salah satunya dengan mengembangkan potensi PAD. Indikator utama keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan mengetahui besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Menurut Andi (2019) menjelaskan bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam APBD maka semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pengeluaran dalam APBD, diartikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pengeluaran rutin dan pembangunan dari dana perimbangan sangat tinggi.

Menurut Zulkarnain (2020) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan. Menurut menurut Risky, dkk (2020) menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen yang disusun organisasi dalam mencapai tujuan. Anggaran pada sektor publik merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Masyarakat dapat memberikan penilaian, masukan, evaluasi, dan kritikan atas suatu anggaran sektor publik. Analisis kinerja keuangan sebagai alat ukur dan evaluasi kinerja bagi pemerintah serta untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, kontribusi pajak daerah terhadap PAD, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dan belanja modal.

Wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sedang melanda hampir di seluruh belahan dunia. Presiden Republik Indonesia memublikasikan awal mula peristiwa covid di Indonesia

tertanggal 2 Maret 2020, United Cities and Local Government (UCLG) pada salah satu artikelnya yang berjudul *The impact of the Covid-19 pandemic on subnational finance. Emergency governance for cities and regions January 2021*, mengatakan bahwa keadaan darurat Covid-19 telah mengakibatkan pergeseran pada kepentingan keuangan, terutama terhadap kesehatan ekonomi lokal dan nasional. Pengeluaran daerah mengalami kenaikan yang tinggi misalnya untuk pembelian peralatan baru, kesehatan, dan layanan sosial.

Keuangan Indonesia sangat berpengaruh dengan adanya Covid-19 ini. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19 juga berpengaruh terhadap keuangan daerah di berbagai tingkat pemerintah salah satunya adalah pemerintah provinsi. Pendapatan pemerintah provinsi cenderung mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, dan biaya atau pengeluaran pemerintah meningkat drastis selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta terjadi penurunan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurut laporan realisasi APBD jika dikomparasikan di tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Total penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp.37.414.754.711.193 jauh lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp.45.707.400.003.802. Provinsi Jawa Barat juga menghadapi hal yang serupa. Total penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar Rp.39.915.362.243.576 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.44.150.909.128.074 (Ringkasan APBD, 2019-2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vladimir, dkk (2020) di Rusia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama belum menunjukkan adanya pengaruh Covid-19 terhadap APBD, namun baru dirasakan adanya dampak krisis ini pada kuartal kedua.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2021) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan beserta solvabilitas operasional pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat Covid-19, serta sebelum dan saat pandemi Covid-19 tidak memberikan pengaruh terhadap rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Donny (2020) menjelaskan bahwa di Indonesia diprediksikan terjadi penurunan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan diantaranya 78% BLU Kesehatan, 46% BLU Pendidikan, dan 47% BLU Lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjelia, dkk (2021) mendeskripsikan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan daripada kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tak signifikan.

Bersumber atas pemaparan latar belakang, peneliti merumuskan masalah diantaranya:

- 1) Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia di masa pandemi Covid-19?
- 2) Apakah ada perbedaan kinerja keuangan daerah provinsi di Indonesia di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan jika hubungan *agency* terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memberikan pekerjaan atau wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2017) mengatakan bahwa Akuntansi publik merupakan tugas seorang pemegang amanah (*agent*) untuk menyampaikan kewajiban, menunjukkan, mengungkapkan, dan menyatakan semua aktivitas atas kewajibannya kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak untuk menuntut akuntabilitas tersebut.

Value For Money

Mardiasmo (2017) mengatakan bahwa Organisasi dijalankan atas dasar *Value for money* yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas dengan mengacu pada tiga tujuan yaitu efisiensi, ekonomi, dan efektivitas.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

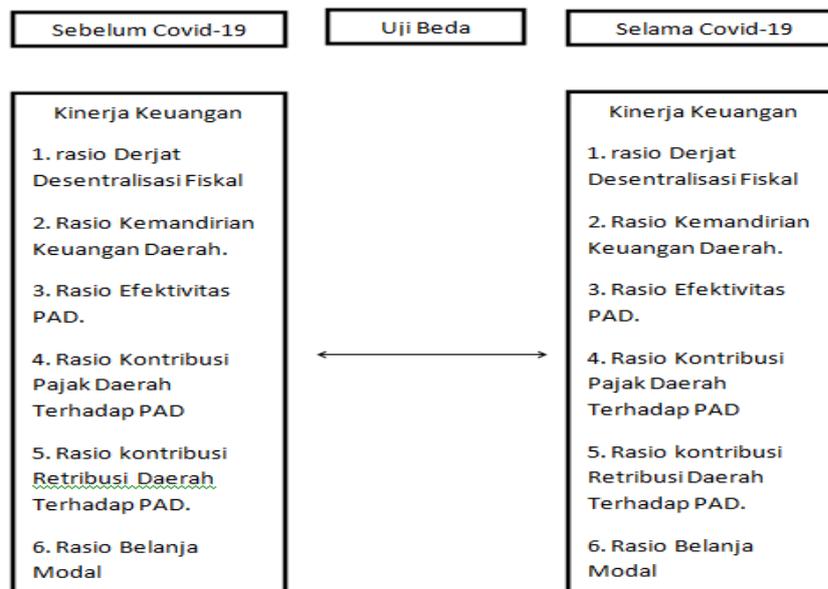
Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja sektor publik menyatakan sejauh mana strategi tercapai, baik dinilai dari aspek finansial dan nonfinansial.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vladimir, dkk (2020) adalah pada kuartal pertama belum menunjukkan adanya pengaruh Covid-19 terhadap APBD, namun baru dirasakan adanya dampak krisis ini pada kuartal kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2021) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan beserta solvabilitas operasional pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat Covid-19, serta sebelum dan saat pandemi Covid-19 tidak memberikan pengaruh terhadap rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. Penelitian yang dilakukan oleh Donny (2020) menjelaskan bahwa di Indonesia di prediksi terjadi penurunan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan diantaranya 78% BLU Kesehatan, 46% BLU Pendidikan, dan 47% BLU Lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Anjelia, dkk (2021) mendeskripsikan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan daripada kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tak signifikan.

Gambar 2. 1

Kerangka Pikir Terhadap Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Covid 19



Sumber: dikembangkan untuk skripsi ini, 2021

Organisasi dikatakan berhasil apabila pengukuran kinerja menunjukkan hasil yang baik. Pengukuran kinerja mampu menilai sejauh mana pencapaian kinerja dan prestasi manajer atas organisasi yang sedang dipimpinya. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat pengawasan organisasi dikarenakan pengukuran kinerja mengacu pada *reward and punishment system*. Menurut Zulkarnain (2020) menjelaskan bahwa pada teori keagenan terdapat kendala asimetri informasi, oleh karena itu sebaiknya informasi yang dimiliki oleh *agent* disajikan secara sepenuhnya (*full disclosure*) dalam laporan keuangan.

Anjelia, dkk (2021) mengatakan bahwa menurunnya kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai akibat dari Covid-19 walaupun dampaknya tidak signifikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut rumusan hipotesis yang disajikan:

H0: Tidak terdapat perbedaan rasio kinerja keuangan pemerintah provinsi sebelum dan selama pandemi Covid-19

Ha: Terdapat perbedaan rasio kinerja keuangan pemerintah provinsi sebelum dan selama pandemi Covid-19

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan sejauh mana kesanggupan suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan belanja daerah yang berasal dari penerimaan pemungutan PAD (Andi, 2019).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total realisasi PAD}}{\text{Total realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Skala interval :

0 – 10 %	= sangat kurang
10 – 20 %	= kurang
20 – 30%	= cukup
30 – 40%	= sedang
40 – 50%	= baik
>50%	= sangat baik

Sumber : (UGM, 1991)

2. kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah mendeskripsikan seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada dana daerah yang diterima dari luar (Risky, dkk 2020 dalam Halim, 2012).

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Total realisasi PAD}}{\text{Total realisasi dana perimbangan}}$$

Skala interval :

0 – 25%	= sangat rendah
25 – 50%	= rendah
50 – 75%	= sedang
75 – 100%	= tinggi

Sumber: (UGM, 1991)

3. Efektivitas PAD

Efektivitas pendapatan asli daerah mendeskripsikan seberapa besar pemerintah daerah mencapai target pendapatan asli daerah di dalam APBD (Anjelia, dkk, 2021).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Target Pendapatan Daerah}}$$

Skala interval :

≤60%	= tidak efektif
60 – 80%	= kurang efektif
80 – 90%	= cukup
90 – 100%	= efektif

≥100 % = sangat efektif

Sumber : (UGM, 1991)

4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah pada PAD menunjukkan seberapa besar pajak daerah menyokong atau menyumbangkan dana atas penerimaan PAD (Annafi, 2015 dalam Halim, 2002).

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$

5. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan seberapa besar retribusi daerah menyokong atau menyumbangkan dana atas penerimaan PAD (Annafi, 2015 dalam Halim, 2002).

$$\text{Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$

6. Belanja Modal

Belanja Modal menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah yang digunakan untuk membeli aset tetap yang memiliki nilai guna lebih dari satu tahun anggaran (Andi, 2019).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total realisasi Belanja Modal}}{\text{Total realisasi Belanja Daerah}}$$

Jenis dan Sumber Data

Peneliti memakai data sekunder Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2019-2020. Data tersebut didapatkan melalui (www.djpk.kemenkeu.go.id). Populasi yang dipakai untuk melakukan kajian ini yaitu semua provinsi di Indonesia dengan total 34 provinsi pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan atas Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengamatan pengkajian dilaksanakan selama 2 periode. Sampel ini digunakan untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian sensus artinya bahwa sampel pada penelitian ini menggunakan satu kelompok populasi.

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan supaya mendapati sifat dari data pada saat sedang diteliti. Statistik deskriptif menyajikan nilai terendah, nilai tertinggi, mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosis.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendapati suatu sebaran data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan sebelum melakukan uji beda. Untuk mendapati sebaran data terbilang normal atau tidak maka peneliti menggunakan uji statistik melalui tes *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Beda T-Statistik

Uji beda memakai *paired sample T-test* diterapkan bilamana data tersebar secara normal. Uji beda dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan beda rata-rata dan sampel yang berkaitan atau berpasangan (*paired sample t-test*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan supaya mendapati sifat dari data pada saat sedang diteliti.

Tabel 4. 1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics													
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
DDF20	34	63	4	67	650	19,12	2,047	11,939	142,531	2,212	,403	6,988	,788
DDF19	34	69	4	73	672	19,76	2,336	13,618	185,458	2,232	,403	6,405	,788
KKD20	34	213	8	221	1212	35,65	6,589	38,422	1476,235	3,724	,403	16,735	,788
KKD19	34	309	6	315	1350	39,71	9,397	54,792	3002,153	4,190	,403	20,135	,788
EPAD20	34	42	60	102	2820	82,94	1,543	8,998	80,966	-,374	,403	,520	,788
EPAD19	34	49	78	127	3374	99,24	1,879	10,957	120,064	,114	,403	,338	,788
PJKD20	34	50	35	85	2045	60,15	2,008	11,709	137,099	,119	,403	-,546	,788
PJK19	34	54	34	88	2142	63,00	2,055	11,980	143,515	,028	,403	-,080	,788
RTBD20	34	17	1	18	162	4,76	,618	3,602	12,973	2,150	,403	5,031	,788
RTBD19	34	18	1	19	173	5,09	,641	3,737	13,962	2,052	,403	4,899	,788
BMD20	34	16	6	22	533	15,68	,659	3,843	14,771	-,071	,403	,109	,788
BMD19	34	15	12	27	672	19,76	,562	3,276	10,731	,189	,403	,328	,788
Valid N (listwise)	34												

Sumber: Data diolah dengan SPSS oleh peneliti, 2021

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendapati suatu sebaran data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan sebelum melakukan uji beda. Untuk mendapati sebaran data terbilang normal atau tidak maka peneliti menggunakan uji statistik melalui tes *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila penelitian terhadap objek menyatakan nilai signifikasinya > 0,05, data menunjukkan tersebar secara normal. Apabila penelitian terhadap objek menyatakan nilai signifikasinya < 0,05, data menunjukkan tersebar secara tidak normal.

Table 4. 2
Uji Normalitas

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of V2 is normal with mean 19 and standard deviation 11.939.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
2	The distribution of V3 is normal with mean 20 and standard deviation 13.618.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
3	The distribution of V4 is normal with mean 38 and standard deviation 38.422.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
4	The distribution of V5 is normal with mean 40 and standard deviation 54.792.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
5	The distribution of V6 is normal with mean 83 and standard deviation 3.998.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis.
6	The distribution of V7 is normal with mean 99 and standard deviation 10.957.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis.
7	The distribution of V8 is normal with mean 50 and standard deviation 11.709.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis.
8	The distribution of V9 is normal with mean 65 and standard deviation 11.980.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis.
9	The distribution of V10 is normal with mean 5 and standard deviation 3.602.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
10	The distribution of V11 is normal with mean 5 and standard deviation 3.737.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.
11	The distribution of V12 is normal with mean 16 and standard deviation 3.843.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis.
12	The distribution of V13 is normal with mean 20 and standard deviation 3.276.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.200 ^{1,2}	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

¹ Lilliefors Corrected

² This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021

Bersumber pada gambar 4.2 uji normalitas dapat diamati dari *Kolmogorov-Smirnov*. Menunjukkan bahwa semua rasio kinerja keuangan yang terdiri atas rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dan rasio belanja modal pada kurun waktu sebelum dan selama Covid-19 menyatakan nilai Sig sebesar 0,200 yang artinya sebaran data terdistribusi normal dengan nilai Sig. melebihi 0,05.

Uji Beda T-Statistik

Berdasarkan uji normalitas yang sudah dilakukan didapatkan bahwa data tersebut secara normal maka Uji beda memakai *paired sample T-test* dapat diterapkan. Uji beda dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan beda rata-rata dan sampel yang berkaitan atau berpasangan (*paired sample t-test*).

Tabel 4. 3
Hasil Uji Hipotesis

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Interval of the				
					Lower	Upper			
Pair 1	DDF 20-19	-0,647	2,485	0,426	-1,514	0,22	-1.518	33	0,138
Pair 2	KKD20-19	-4,059	17,429	2,989	-10,140	2,022	-1,358	33	,184
Pair 3	EPAD20-19	-16,294	9,778	1,677	-19,706	-12,882	-9,717	33	,000
Pair 4	PJKD20-19	-2,853	2,414	,414	-3,695	-2,011	-6,892	33	,000
Pair 5	RTBD20-19	-,324	1,224	,210	-,751	,104	-1,541	33	,133
Pair 6	BMD20-19	-4,088	1,975	,339	-4,777	-3,399	-12,069	33	,000

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS, 2021

1. Dalam variabel desentralisasi fiskal, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) 0,138 > 0,05 menyatakan tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat derajat desentralisasi fiskal sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2. Dalam variabel kemandirian keuangan daerah, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) $0,184 > 0,05$ menyatakan tidak ada perbedaan signifikan atas tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Dalam variabel efektivitas PAD, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) $0,000 < 0,05$ menyatakan ada beda yang signifikan atas efektivitas PAD sebelum serta saat pandemi Covid-19.
4. Dalam variabel pajak daerah, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) $0,000 < 0,05$ menyatakan ada perbedaan signifikan pada kontribusi pajak daerah pada PAD sebelum serta saat pandemi Covid-19.
5. Dalam variabel retribusi daerah, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) $0,133 > 0,05$ menyatakan tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat kontribusi retribusi daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19.
6. Dalam variabel belanja modal, didapatkan nilai paired sample test sig (2-tailed) $0,000 < 0,05$ menyatakan ada perbedaan signifikan atas tingkat belanja modal sebelum dan selama pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Bersumber pada kajian uji *Paired Sample Test* diperoleh kesimpulan terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19.

Keterbatasan yang dilalui oleh peneliti ketika menjalankan penelitian ini adalah Peneliti melakukan pengamatan data pada periode dengan ekspektasi waktu selama dua tahun yaitu masa sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk mengetahui adakah pengaruh terhadap kinerja keuangan. Periode dan ekspektasi yang lebih luas dalam menggambarkan informasi akan dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan di sektor pemerintah serta tidak adanya variabel kontrol dikarenakan peneliti menggunakan *uji paired sample t-test* yang mengakibatkan hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak diteliti.

REFERENSI

- Andi, P. 2019. Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng: *Journal Economic Resources*. Vol. 2, No. 2.
- Anjelia, O., dkk. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara: *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 22, No. 2.
- Annafi, I. T. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: *JRAK*. Vol. 6, No. 2, 20-32.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. "APBD" (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). www.djpk.kemenkeu.go.id
- Donny, M. P. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Proyeksi Kinerja Keuangan dan Kinerja Layanan Badan Layanan Umum di Indonesia: *Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Kurnia, A.H., dkk.. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Risky, T.H.P., dkk. 2020. Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Daerah Kota Magelang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* : Vol. 5, No. 2, 151-173.
- UGM, F. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. In *Laporan Akhir Penelitian*.

United Cities and Local Government (UCLG). 2020. *The impact of the Covid-19 pandemic on subnational finance. Emergency governance for cities and regions January 2021.* diunduh 2 Mei 2021.

https://www.uclg.org/sites/default/files/an03the_impact_of_the_covid19_subnational_finances.pdf

Vladimir, K.,dkk. 2020. Fiscal resilience of Russia's regions in the face of COVID-19: *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.*

Zulkarnain. 2020. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat: *CAKRAWALA – Repositori IMWI.* VOL. 3, No. 1.